

Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Balindo Sejahtera Bersama

Ni Made Safitri⁽¹⁾

Ni Putu Ayu Kusumawati⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia Denpasar
 Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar
 e-mail: safitrinimade25@gmail.com

ABSTRACT

Internal Control is a process carried out under the mandate of the board of directors or management within an organization, aimed at protecting the company's assets and ensuring compliance with applicable laws and regulations. This research was conducted at PT Balindo Sejahtera Bersama, a company engaged in the property agency sector. The purpose of this research is to determine the implementation of the internal control system for cash receipts and disbursements at PT Balindo Sejahtera Bersama. The method used in this research is the comparative analysis method, which involves analyzing the conditions of the company being studied and comparing them with existing theories to draw conclusions on whether the internal cash control system in the research object aligns with the theory or not. The data collection techniques used are through observation, interviews, documentation, and literature study. The results of this study indicate that PT Balindo Sejahtera Bersama has not yet implemented an internal control system effectively and is not fully in accordance with existing theories, as there are still elements of internal control within the company that have not been fully executed.

Keywords: *Internal Control System, Cash Receipts, Cash Disbursements*

PENDAHULUAN

Pencapaian efisiensi dalam operasional, terjaganya keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada regulasi yang berlaku pada dasarnya merupakan sasaran esensial dari implementasi sistem pengendalian intern yang tertata dengan baik. Hal ini selaras dengan gagasan Horngren & Harrison Jr (2007:4) yang menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang memadai guna merealisasikan tujuan entitas merupakan kewajiban mendasar bagi jajaran manajemen. Dalam praktiknya, urgensi pengawasan tersebut semakin meningkat ketika dihadapkan pada tata kelola aset kas. Sebagai komponen yang paling vital namun di saat yang sama sangat rentan, karakteristik kas yang sangat likuid menjadikannya instrumen yang paling berisiko terhadap ancaman manipulasi maupun penyelewengan (Pratiwi, 2022). Berangkat dari kondisi tersebut, eksistensi mekanisme pengendalian intern yang tangguh mutlak diperlukan, bukan semata-mata untuk mengamankan wujud fisik kas, melainkan juga untuk memastikan tingkat presisi dan akurasi dalam pencatatan akuntansi (Mulyadi, 2016:131).

Sebagai sebuah biro agen properti yang berkedudukan di Bali dan telah beroperasi sejak tahun 2023, PT Balindo Sejahtera Bersama dihadapkan pada dinamika pengelolaan arus kas yang

sarat akan kompleksitas. Siklus finansial entitas ini mencakup rentang transaksi yang luas, bermula dari pengelolaan uang titipan pelanggan (buyer) hingga proses pengakuan pendapatan komisi. Kendati demikian, tinjauan terhadap laporan keuangan tahun 2025 yang ditujukan untuk keperluan pelaporan SPT Tahunan justru menyingkap adanya indikasi kelemahan struktural yang cukup serius. Terdapat sejumlah anomali prosedural yang berhasil diidentifikasi, di antaranya meliputi absennya dokumen sumber yang krusial, seperti invoice kas masuk dan nota kas keluar, di samping adanya kekeliruan dalam pengklasifikasian akun. Adapun temuan yang paling fundamental bermuara pada pencatatan Jurnal Penyesuaian (*Adjustment*) pada akun “Utang Owner” dengan nilai sebesar Rp 31.733.000, yang nyatanya dieksekusi tanpa dilandasi oleh bukti transaksi pendukung yang valid. Lemahnya sistem pengawasan terhadap sirkulasi kas ini pun terindikasi semakin diperparah oleh praktik penggunaan aplikasi spreadsheet yang belum terintegrasi dengan fitur rekam jejak historis otomatis (*audit trail*). Mempertimbangkan rentetan fenomena empiris tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada upaya evaluasi secara komprehensif terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas di lingkungan entitas terkait.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern

Dalam literatur akuntansi, keberadaan sistem pengendalian intern menempati posisi sentral sebagai instrumen pengamanan aset entitas. Merujuk pada pemikiran Sujarweni (2019:69), sistem ini secara khusus dikonstruksi guna memberikan keyakinan yang memadai dalam melindungi berbagai elemen krusial perusahaan dari potensi pencurian, penyelewengan, hingga kekeliruan dalam proses pencatatan. Secara lebih komprehensif, Mulyadi (2016:131) mengonseptualisasikan pengendalian intern sebagai sebuah integrasi antara struktur organisasi, serangkaian metode, serta instrumen pengukuran yang dikoordinasikan secara harmonis. Konvergensi dari berbagai elemen tersebut ditujukan untuk mengamankan kekayaan organisasi, memverifikasi tingkat akurasi sekaligus keandalan data akuntansi, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan memastikan ditaatinya seluruh kebijakan yang telah digariskan oleh pihak manajemen (Puteri et al., 2024).

Guna merealisasikan serangkaian tujuan esensial tersebut, Mulyadi (2016:130) lebih lanjut memformulasikan empat pilar atau unsur pokok pengendalian intern yang mutlak harus diaplikasikan oleh suatu entitas bisnis, yakni sebagai berikut:

1. **Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas** Fungsi-fungsi vital dalam perusahaan, seperti fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi, harus didesentralisasi dan dipisahkan secara rigid. Pemisahan wewenang ini sangat krusial untuk memitigasi risiko dengan mencegah dominasi satu individu dalam mengeksekusi suatu siklus transaksi secara penuh, mulai dari tahap inisiasi hingga penyelesaian akhir.
2. **Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memadai** Parameter ini mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan baru sah untuk diproses apabila telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang memiliki legitimasi wewenang. Di samping itu, desain prosedur pencatatan harus mampu menjamin terbentuknya *audit trail* (jejak audit) yang transparan dan dapat ditelusuri, sebagai wujud proteksi terhadap kekayaan maupun kewajiban finansial perusahaan.
3. **Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi** Penerapan standar operasional yang sehat direpresentasikan melalui berbagai upaya pengawasan preventif. Praktik ini umumnya diimplementasikan dalam bentuk penggunaan formulir bernomor urut tercetak (sebagai alat kontrol dokumen), pelaksanaan inspeksi tanpa pemberitahuan sebelumnya (*surprise check*), perputaran posisi atau rotasi jabatan secara berkala, serta pemberlakuan kewajiban bagi karyawan untuk mengambil hak cuti tahunannya.
4. **Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya** Keandalan struktural dan prosedural tidak akan berarti banyak tanpa ditopang oleh kualitas sumber daya manusianya. Secanggih apapun sebuah sistem pengendalian dirancang, efektivitas operasionalnya akan tetap lumpuh apabila tidak dijalankan oleh personel yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, tetapi juga memegang teguh prinsip kejujuran serta kedisiplinan kerja.

Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas

Sebagai aset yang berada pada tingkat likuiditas tertinggi, kas memiliki kerentanan yang esensial terhadap berbagai potensi penyelewengan. Oleh karena itu, pengawasan yang sangat ketat dan berlapis menjadi sebuah keharusan manajerial (Martani et al., 2024:180). Dalam konteks penerimaan kas, efektivitas sistem pengendalian intern sangat bergantung pada penerapan segregasi tugas yang definitif. Secara spesifik, pemisahan wewenang ini harus diimplementasikan

secara tegas antara pihak yang bertugas melakukan penagihan, pihak yang mengelola wujud fisik kas, serta bagian akuntansi yang bertanggung jawab penuh atas pencatatan.

Lebih lanjut, fondasi utama dalam mengendalikan arus kas masuk bersandar pada tiga prinsip manajerial yang krusial. Pertama, segala bentuk penerimaan, baik melalui transaksi tunai maupun transfer, wajib diadministrasikan seketika itu juga dengan merujuk pada dokumen sumber yang sah, seperti kuitansi yang telah dilengkapi dengan nomor urut tercetak. Kedua, akumulasi penerimaan kas dalam satu siklus harian harus disetorkan secara utuh ke rekening bank perusahaan pada hari yang sama, atau selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. Ketiga, mekanisme *check and balance* harus diwujudkan melalui pelaksanaan rekonsiliasi bank secara berkala. Proses ini wajib dilakukan oleh personel yang independen, yakni mereka yang tidak memiliki otoritas langsung dalam pengelolaan fisik maupun pencatatan harian kas ((Tangkau et al., 2023).

Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas

Beralih pada tata kelola pengeluaran kas, fokus pengendalian intern diarahkan untuk menjamin bahwa setiap aliran dana keluar telah melewati prosedur otorisasi yang sah dan dialokasikan secara eksklusif untuk mendanai kegiatan operasional entitas. Asas fundamental dalam pengendalian ini mengamanatkan bahwa pengeluaran dengan nilai nominal yang material wajib dieksekusi menggunakan instrumen perbankan (misalnya cek, bilyet giro, atau transfer elektronik), yang tentunya membutuhkan persetujuan langsung dari level pimpinan atau dewan direksi.

Di sisi lain, untuk mengakomodasi kebutuhan operasional yang bernominal kecil, perusahaan lazimnya memfasilitasi mekanisme dana kas kecil (*petty cash*). Guna memastikan pengawasan tetap berjalan optimal, pengelolaan instrumen ini sangat direkomendasikan untuk mengadopsi sistem dana tetap (*imprest fund system*). Dalam skema ini, pemegang kas kecil dilarang keras untuk mencampuradukkan atau menerima aliran pemasukan operasional. Mereka hanya diberikan hak untuk mengajukan pengisian kembali (*replenishment*) sebesar nominal yang telah terpakai, dengan kewajiban melampirkan dokumen pendukung yang valid (Bukti Pengeluaran Kas Kecil). Sebagai upaya mitigasi terhadap risiko pengeluaran ganda atau penyalahgunaan dana, setiap arus kas keluar mutlak harus didukung oleh dokumen otorisasi resmi berupa Bukti Kas Keluar (BKK) yang telah disetujui.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, studi ini dirancang menggunakan desain penelitian deskriptif yang berlandaskan pada pendekatan kualitatif. Guna membedah fenomena teknis yang secara riil terjadi di lapangan, cakupan investigasi dikerucutkan secara spesifik pada empat elemen pokok pengendalian intern yang digagas oleh (Mulyadi, 2016:130). Adapun keseluruhan rangkaian penelitian ini diselenggarakan di lingkungan PT Balindo Sejahtera Bersama dalam kurun waktu tiga bulan, terhitung sejak Januari hingga Maret 2026.

Terkait dengan pemenuhan basis informasi, studi ini menghimpun dua representasi data utama. Data primer digali secara langsung melalui instrumen wawancara bersama Manajer Operasional, sementara data sekunder diekstraksi dari berbagai catatan dan arsip perusahaan. Untuk mengoptimalkan perolehan data yang komprehensif, peneliti mengaplikasikan strategi pengumpulan informasi secara terintegrasi melalui tahapan observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Selanjutnya, tahapan analisis data dieksekusi dengan mengandalkan metode komparatif. Proses analitis ini mencakup serangkaian fase berurutan, bermula dari proses reduksi data, pemetaan temuan ke dalam format tabel komparatif, evaluasi tingkat kesesuaian prosedur, hingga pada akhirnya bermuara pada perumusan konklusi serta pemberian rekomendasi strategis. Sebagai instrumen validasi guna menjamin tingkat keabsahan temuan, peneliti mengadopsi metode triangulasi teknik. Prosedur ini difungsikan secara khusus untuk mengkalibrasi dan menguji konsistensi silang antara keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pembuktian fisik dokumen pelaporan keuangan entitas terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Struktur Organisasi

Profil entitas dan konfigurasi organisasional PT Balindo Sejahtera Bersama yang berkedudukan di kawasan Seminyak, Bali, pada dasarnya menitikberatkan kegiatan operasionalnya pada sektor pemasaran sekaligus penjualan real estat. Secara hierarkis, entitas ini telah memformulasikan struktur kepegawaian yang mencakup jajaran Komisaris, Direktur, Manajer Operasional, tim Digital Marketing, hingga posisi Admin *Finance & Accounting Tax*. Kendati postur organisasi tersebut telah diresmikan di atas kertas, realita empiris di lapangan justru mengindikasikan adanya defisit ketersediaan sumber daya manusia. Kondisi ini secara langsung berimplikasi pada munculnya praktik perangkapan tanggung jawab fungsional di antara para personel yang ada.

Prosedur Penerimaan Kas

Terkait dengan mekanisme penerimaan kas, siklus finansial pada perusahaan ini sangat bertumpu pada tata kelola atas pendapatan komisi yang bersumber dari aktivitas agensi properti. Secara prosedural, tahapan penagihan diinisiasi melalui penerbitan dokumen *invoicing* yang dikerjakan sepenuhnya oleh departemen *Accounting*. Pasca melalui tahap verifikasi internal oleh Manajer Operasional, dokumen tagihan tersebut lantas didistribusikan kepada pihak pemilik aset (*owner*). Selanjutnya, proses penyelesaian kewajiban oleh klien direalisasikan melalui mekanisme transfer antarbank yang ditujukan ke rekening korporat, di mana lalu lintas dana ini berada di bawah pantauan langsung dari pihak pimpinan. Begitu aliran dana terkonfirmasi masuk, departemen *Accounting* akan kembali mengambil alih proses bisnis untuk memvalidasi mutasi perbankan sekaligus mengeksekusi pencatatan pengakuan pendapatan ke dalam perangkat lunak *spreadsheet* (Excel). Akan tetapi, teridentifikasi celah kelemahan yang sangat esensial dalam alur ini, yakni terjadinya pemusatan wewenang secara berlebihan pada bagian *Accounting* serta praktik pencetakan *invoice* yang hanya dibatasi pada satu rangkap. Imbasnya, perusahaan secara praktis kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi pengawasan silang (*cross-check*) dan tidak memiliki landasan pengarsipan permanen yang memadai guna membuktikan otentisitas setiap transaksi.

Prosedur Pengeluaran Kas dan Kas Kecil

Pada aspek tata kelola arus kas keluar, entitas menerapkan dikotomi prosedur yang secara spesifik memisahkan antara pengeluaran bernominal material yang difasilitasi melalui transfer bank untuk menunjang operasional utama dengan skema dana kas kecil (*petty cash*) yang diperuntukkan bagi pengeluaran rutin berskala minor. Untuk alur pengeluaran yang menggunakan instrumen bank, kerangka pengendalian otorisasinya sejatinya telah dirancang secara berjenjang dan cukup ketat. Siklusnya bermula dari pengajuan anggaran oleh staf, dilanjutkan dengan tahap verifikasi oleh Manajer Operasional, kemudian dipersiapkan transaksinya oleh bagian *Accounting* selaku *maker*, hingga pada akhirnya dieksekusi berdasarkan tahap otorisasi final (*approval*) dari jajaran Direktur. Di sisi lain, mekanisme pengelolaan kas kecil mewajibkan staf terkait untuk menyerahkan bukti nota fisik kepada bagian *Accounting*. Dokumen tersebut nantinya akan dimintakan persetujuan kepada Manajer sebelum tahapan pencairan ganti rugi (*reimbursement*) dan pencatatan ke dalam jurnal dilakukan. Meskipun hierarki otorisasi dalam pengeluaran kas ini secara umum dinilai sudah cukup kapabel, tahapan pencatatan akhir nyatanya masih menyisakan titik kerentanan yang masif. Hal ini dikarenakan seluruh rekapitulasi pengeluaran bermuara pada

penginputan ke dalam aplikasi *spreadsheet* yang sama sekali tidak ditunjang oleh kapabilitas rekam jejak historis yang terotomatisasi (*audit trail*). Terlebih lagi, prosedur administratif yang ada belum mewajibkan penggunaan formulir dengan sistem nomor urut tercetak (*prenumbered*) secara menyeluruh.

Tabel 1. Analisis Sistem Pengendalian Intern Kas

No	Pengendalian Intern	Kondisi PT Balindo Sejahtera Bersama	Keterangan
(Mulyadi, 2016)			
1.	Pemisahan Tanggung Jawab Fungsional	Fungsi pencatatan, penagihan, dan rekonsiliasi masih terpusat di bagian <i>Accounting</i> .	Tidak Sesuai
2.	Sistem Wewenang & Pencatatan	Otorisasi sudah ada, namun pencatatan via Excel tanpa <i>audit trail</i> dan dokumen rangkap satu.	Tidak Sesuai
3.	Praktik yang Sehat	Belum ada pemeriksaan mendadak (<i>surprise audit</i>) dan formulir belum bernomor urut cetak.	Tidak Sesuai
4.	Mutu Karyawan & Pengawasan	Pimpinan melakukan pengawasan harian, namun verifikasi dokumen belum mendalam.	Sesuai Sebagian

Sumber: Data primer diolah, 2026

Pembahasan Temuan

1. Struktur Organisasi

Mengkaji aspek struktur organisasi, temuan lapangan mengindikasikan adanya tumpang tindih kewenangan secara substansial di dalam departemen keuangan. Penugasan satu personel untuk mengeksekusi serangkaian proses krusial secara end-to-end—mulai dari penagihan, penjurnalan, hingga rekonsiliasi bank—secara praktis telah menganulir mekanisme pengawasan silang (*cross-check*). Akibatnya, sistem pengendalian menjadi sangat rentan terhadap potensi manipulasi data yang dapat dilakukan tanpa memicu peringatan dini.

2. Kelemahan Dokumentasi

Tinjauan terhadap aspek administratif menyingkap celah yang signifikan dalam sistem dokumentasi perusahaan. Prosedur penerbitan *invoice* penerimaan yang hanya dicetak tunggal (satu rangkap) berdampak pada ketiadaan arsip salinan pembanding. Situasi ini bermuara pada sulitnya membuktikan validitas pengakuan pendapatan manakala terjadi anomali atau selisih

pencatatan. Lebih jauh lagi, standar operasional pada siklus pengeluaran kas belum sepenuhnya mengadopsi instrumen formulir bernomor urut tercetak (*prenumbered*) secara konsisten.

3. Risiko Teknologi

Ketergantungan entitas terhadap aplikasi *spreadsheet* memunculkan titik kerentanan teknologi yang sangat kritis. Insiden terjadinya selisih kas yang dibarengi dengan kemunculan akun “Utang Owner” senilai Rp 31.733.000 merupakan implikasi langsung dari keterbatasan fungsionalitas sistem tersebut. Absennya kapabilitas perangkat lunak dalam merekam jejak historis modifikasi data secara otomatis membuka ruang eksploitasi yang masif, di mana penginputan jurnal akuntansi dapat dengan mudah direkayasa tanpa perlu menyertakan bukti transaksi yang sah.

4. Pengawasan Pimpinan

Evaluasi terhadap efektivitas kontrol manajerial menunjukkan bahwa fungsi supervisi harian yang diinisiasi oleh Manajer Operasional masih belum komprehensif. Rentang pengawasan yang berjalan saat ini terlampau superfisial karena hanya dititikberatkan pada kecocokan saldo akhir perbankan. Sementara itu, prosedur verifikasi secara mendalam dan ketat terhadap validitas lampiran nota fisik yang esensinya merupakan landasan fundamental bagi setiap penjurnalan akuntansi terbukti belum diimplementasikan dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Merujuk pada pemaparan hasil analisis beserta pembahasan mendalam terkait tata kelola Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas di lingkungan PT Balindo Sejahtera Bersama, riset ini bermuara pada satu konklusi utama. Secara garis besar, entitas ini belum mampu menyelenggarakan mekanisme pengendalian intern yang beroperasi secara efektif maupun sejalan dengan landasan teoretis yang berlaku. Indikasi atas ketidakefektifan tersebut terefleksi secara nyata melalui sejumlah celah kelemahan fundamental berikut ini:

1. Belum Optimalnya Segregasi Fungsi

Praktik di lapangan mengindikasikan absennya demarkasi atau pemisahan tanggung jawab fungsional yang rigid. Penyatuan peran antara pihak yang memegang otoritas atas wujud fisik

2. Kerapuhan Sistem Pencatatan dan Mekanisme Otorisasi

3. Defisit Penerapan Praktik yang Sehat

4. Kesenjangan Mutu Karyawan terhadap Beban Tanggung Jawab

Saran

1. Bagi Pihak Perusahaan:

- Jajaran manajemen dituntut untuk segera mengeksekusi penataan ulang terhadap distribusi wewenang. Langkah ini mutlak harus memisahkan secara definitif antara

fungsi otorisasi transaksi, penjagaan atau penyimpanan wujud kas, dan fungsi tata usaha (pencatatan akuntansi).

b. Modernisasi Sistem Berbasis Teknologi

Menjadi sebuah urgensi bagi entitas untuk segera bermigrasi dari ketergantungan *spreadsheet* manual menuju implementasi perangkat lunak (*software*) akuntansi yang komprehensif dan terintegrasi. Transisi ini ditujukan semata-mata untuk mengonstruksi *audit trail* yang mumpuni.

c. Eskalasi Intensitas Pengawasan

Sangat direkomendasikan agar perusahaan mulai merumuskan dan memberlakukan regulasi terkait pelaksanaan pemeriksaan fisik kas secara mendadak (*surprise check*) pada periode yang tidak ditentukan, serta diiringi dengan pengetatan lapis otorisasi dalam setiap pengajuan pengeluaran.

d. Peningkatan Kapasitas SDM

Manajemen perlu berinvestasi pada pengembangan *human capital* dengan memfasilitasi program-program pelatihan. Edukasi teknis seperti *workshop* operasional *software* akuntansi atau pendalaman kelas administrasi keuangan menjadi krusial agar kapabilitas staf dapat selaras dengan tuntutan standar operasional yang ideal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Bagi civitas akademika yang hendak mengeksplorasi ranah ini lebih jauh, diharapkan tidak membatasi ruang lingkup kajiannya hanya pada siklus penerimaan dan pengeluaran kas semata. Akan jauh lebih komprehensif dan memberikan kontribusi literatur yang luas apabila riset mendatang dapat merambah ke siklus operasional lainnya, semisal tata kelola siklus penggajian (*payroll*), atau bahkan membedah seberapa empiris implikasi budaya organisasi terhadap tingkat efektivitas sistem pengendalian intern di suatu korporasi.

Daftar Pustaka

- Horngren, C. T., & Harrison Jr, W. T. (2007). Akuntansi jilid satu. *Edisi Tujuh*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. (2024).

Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2. Penerbit Salemba.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi (Edisi 4)*.

Pratiwi, N. P. A. A. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Karya Manajemen Solusindo. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(4), 141–149.

Puteri, A. D., Indrawan, A., & Martaseli, E. (2024). Analysis of the Internal Control System of Cash Receipts and Disbursements. *Expensive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 225–235.

Sujarweni, V. W. (2019). *Sistem Akuntansi Yogyakarta: Pustaka Baru Pres*.

Tangkau, J., Lontoh, M., & Mokoagow, N. R. (2023). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 224–235.